

TESIS

**PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE*
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DIMODERASI OLEH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE*
DAN *LEVERAGE***

***THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE
ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE
MODERATED BY INTERGOVERNMENTAL REVENUE AND
LEVERAGE***

HISYAM ICHSAN



**PROGRAM MAGISTER SAINS AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMODERASI OLEH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE* DAN *LEVERAGE*

THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE ON LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE MODERATED BY INTERGOVERNMENTAL REVENUE AND LEVERAGE

sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**HISYAM ICHSAN
P3400216025**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019**



Optimization Software:
www.balesio.com

TESIS

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMODERASI OLEH INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN LEVERAGE

disusun dan diajukan oleh

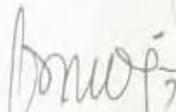
HISYAM ICHSAN
P3400216025

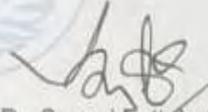
telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **28 Desember 2018** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota


Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA
NIP 19660822 199403 1 009


Dr. Sanusi Fatah, S.E., M.Si
NIP 19690413 199403 1 003

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. R.A. Damayanti, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP 19670319 199203 2 003


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP 19640205 198810 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hisyam Ichsan

Nim : P3400216025

Jurusan/Program Studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DIMODERASI OLEH *INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN LEVERAGE*

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan

Hisyam Ichsan



PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu Alaukum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas rahmat serta karunia Allah Subhanahuwata'aala yang telah memberikan segala hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk tesis. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terimah kasih peneliti ucapkan kepada Rektor, Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada bapak Dr. Darwis Said., S.E., Ak., M.SA. dan bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. sebagai tim penasehat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., M.S., CA., Bapak Dr. Syamsuddin., S.E., Ak., M.Si., CA., dan Ibu Dr. Nirwana, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku tim penguji yang telah memberikan koreksi demi perbaikan Tesis ini.

Ucapan terima kasih kepada ayahanda Drs. Daeng Sihaka, M.M. dan ibunda Dra. Sitti Harlina Syamsuddin yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil serta doa restu kepada peneliti selama hidup peneliti khususnya pada saat pembuatan tesis ini hingga selesai. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penelitian ucapkan kepada saudari peneliti yaitu Nur Fitriana, S.ST..

Ucapan terima kasih selanjutnya peneliti tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam pengumpulan data sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada seluruh teman-teman sejawat terkhusus pada Program Magister Sains Akuntansi 2016 khususnya

2016.

Terakhir, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat sebutkan satu persatu atas segala bantuannya selama peneliti menempuh pendidikan. Semoga semua pihak mendapat kebaikan serta perlindungan dari-



Nya atas bantuan yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun menerima bantuan dari berbagai pihak. Namun, apabila terdapat beberapa kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan pada pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Wassalam.

Makassar, Januari 2019

Peneliti,

HISYAM ICHSAN



ABSTRAK

HISYAM ICHSAN. Pengaruh *Intellectual Capital Disclosure* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dimoderasi oleh *Intergovernmental Revenue* dan *Leverage*. (Dibimbing oleh Darwis Said dan Sanusi Fattah).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) pengaruh *intellectual capital disclosure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan; (2) *intergovernmental revenue* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital disclosure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan; dan (3) *leverage* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital disclosure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung yaitu menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif korelasional yang menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Teknik analisisnya menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi sektor publik yaitu seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *intellectual capital disclosure* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; (2) *intergovernmental revenue* memoderasi pengaruh *intellectual capital disclosure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah; dan (3) *leverage* tidak memoderasi pengaruh *intellectual capital disclosure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Intellectual capital disclosure*, kinerja keuangan, *intergovernmental revenue*, *leverage*



ABSTRACT

HISYAM ICHSAN. *The Effect of Intellectual Capital Disclosure on Local Government Financial Performance Moderated by Intergovernmental Revenue and Leverage.* (Supervised by Darwis Said and Sanusi Fattah).

The research aimed at investigating: (1) the effect of intellectual capital disclosure on the local governments financial performance; (2) that the intergovernmental revenue could moderate the influence of the intellectual capital disclosure on the local governments financial performance; and (3) that the leverage could moderate the impact of the intellectual capital disclosure on the local governments financial performance in South Sulawesi.

This research used the indirect method namely using the secondary data in the form of Local Government Financial Reports (LGFR). This was the correlational descriptive research elaborating the effect of the independent variables on the dependent variable. Data were analysed using the Moderated Regression Analysis (MRA). The research analysis units were the public sector organizations namely all Regency/City in South Sulawesi Province.

The research results indicates that: (1) intellectual capital disclosure has the positive and significant effect on the local governments financial performance; (2) intergovernmental revenue moderates the influence of the intellectual capital disclosure on the local governments financial performance; and (3) leverage does not moderate the impact of intellectual capital disclosure on the local governments financial performance.

Key words: Intellectual capital disclosure, financial performance, intergovernmental revenue, leverage



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoretis.....	12
1.4.2 Kegunaan Praktis	12
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	14
2.1.1 Stakeholder Theory	14
2.1.2 Resource Based View Theory	15
2.1.3 Intellectual Capital Disclosure	17
2.1.4 Intergovernmental Revenue	21
2.1.5 Leverage.....	24
2.1.6 Laporan Keuangan Sektor Publik.....	26
2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	28
2.2 Tinjauan Empiris	30
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	36
3.1 Kerangka Pemikiran	36
3.2 Hipotesis	37
METODE PENELITIAN	42
4.1 Rancangan Penelitian	42
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	42
4.3 Populasi	42
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	43



4.5 Metode Pengumpulan Data.....	43
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	43
4.7 Instrumen Penelitian.....	48
4.8 Teknik Analisis Data.....	48
BAB V	
HASIL PENELITIAN	55
5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	55
5.2 Uji Asumsi Klasik.....	57
5.2.1 Uji Normalitas.....	57
5.2.2 Uji Heteroskedastisitas.....	58
5.2.3 Uji Moltikolinieritas	58
5.3 Analisis Regresi	59
5.3.1 Analisis Regresi Tanpa Variabel Moderasi	59
5.3.2 Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi Intergovernmental <i>Revenue</i>	60
5.3.3 Analisis Regresi dengan Variabel Moderasi <i>Leverage</i>	62
5.4 Uji Hipotesis	63
BAB VI	
PEMBAHASAN	66
6.1 <i>Intellectual Capital Disclosure</i> Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Kinerja Keuangan.....	66
6.2 <i>Intergovernmental Revenue</i> Memoderasi Pengaruh <i>Intellectual Capital Disclosure</i> terhadap Kinerja Keuangan.....	68
6.3 <i>Leverage</i> Memoderasi Pengaruh <i>Intellectual Capital Disclosure</i> erhadap Kinerja Keuangan	71
BAB VII	
PENUTUP	74
7.1 Kesimpulan	74
7.2 Implikasi	75
7.3 Keterbatasan.....	75
7.4 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan.....	8
1.2 Tingkat Kewajiban Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Selatan.....	9
4.1 Elemen-Element <i>Intellectual Capital</i>	45
4.2 Definisi Operasional.....	47
5.1 Analisis Deskriptif.....	55
5.2 Uji Multikolinieritas.....	59
5.3 Uji Regresi Tanpa Variabel Moderasi.....	59
5.4 Nilai R <i>Square</i> Uji Regresi Tanpa Variabel Moderasi.....	60
5.5 Uji Regresi dengan Variabel Moderasi Z1.....	61
5.6 Nilai R <i>Square</i> Uji Regresi dengan Variabel Moderasi Z1.....	61
5.7 Uji Regresi dengan Variabel Moderasi Z2.....	62
5.8 Nilai R <i>Square</i> Uji Regresi dengan Variabel Moderasi Z2.....	62
5.9 Hasil Uji Hipotesis Penelitian.....	63
6.1 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	36
3.2 Diagram Alur Penelitian	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Peta Teori.....	83
2	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	93
3	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	94
4	Hasil Uji Regresi.....	97





Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan kemandirian dan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, anggaran, maupun sumber daya lain yang merupakan bagian dari kekayaan daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya dan keuangannya sesuai dengan prinsip dan asas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah juga diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Halim (2007) laporan keuangan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengandung pengertian sebagai suatu informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Pengukuran kinerja perlu dilakukan karena dilihat dari sifat dasar pemerintah daerah yang merupakan organisasi sektor publik yaitu tidak mencari profit.

Harman (1997) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa



pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Perhatian besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktivitas pada organisasi sektor publik (Halachmi, 2005). Mardiasmo (2004) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja yang bersumber dari informasi finansial, seperti laporan keuangan, diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dan menghasilkan output yang diinginkan sesuai dengan sasaran yang diinginkan pemerintah dan pihak eksternal misalnya masyarakat. Proses panjang dibutuhkan dalam mencapai target kinerja keuangan setiap pemerintah daerah karena terdapat kendala dalam pencapaian target tersebut sehingga berdampak pada output yang diharapkan pemerintah daerah.

Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam mencapai target kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Misalnya dalam pencapaian kinerja keuangan pemerintah kota Makassar pada tahun 2016, rasio efektifitas yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mencapai target PAD kota Makassar hanya memperoleh hasil sebesar 75,6% yang berarti hasil tersebut memberikan gambaran pemerintah kota Makassar berada pada tingkat kurang efektif. Rasio kemandirian pemerintah kota Makassar pada tahun 2016 memperoleh nilai 42,3% yang berada pada tingkat rendah. (LHP BPK, 2017)

merintah kota Makassar masih menemukan berbagai permasalahan
encapai target kinerja keuangannya seperti: sebagian pendapatan



daerah belum memiliki *database* yang akurat, sumber daya aparatur khususnya pengelolaan Pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan, penerimaan masyarakat terhadap aturan yang menyangkut pajak dan retribusi belum maksimal, sarana dan prasarana pendukung pelayanan pemungutan baik pajak dan retribusi daerah relatif masih kurang memadai, produktivitas pemanfaatan aset/kekayaan daerah, penerimaan yang bersumber dari perusahaan daerah masih kecil karena masih diperhadapkan dengan berbagai masalah manajemen dan modal. Pemerintah kota Makassar juga menemukan kendala dalam mencapai target kinerja keuangan pada pos belanja daerah seperti: laju pertumbuhan belanja jauh melampaui pertumbuhan pendapatan; penerimaan dana alokasi umum tidak berbanding lurus dengan peningkatan alokasi anggaran untuk belanja gaji PNS; kebutuhan belanja operasional penyelenggaraan pemerintahan relatif cukup besar bahkan tidak dapat ditutup dari pendapatan asli daerah (PAD), sementara dana alokasi umum (DAU) relatif hanya dapat menutupi penyediaan anggaran gaji; dan masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia. (LHP BPK, 2017)

Hal serupa juga terjadi pada pemerintah daerah lainnya. Pemerintah kabupaten Jeneponto pada tahun 2016 memperoleh nilai rasio efektifitas sebesar 74,7% dan rasio kemandirian 6,7%. Hal tersebut dapat memberikan gambaran bahwa tingkat kemandirian kabupaten Jeneponto berada pada tingkat sangat rendah dan efektifitas berada pada tingkat yang kurang efektif. (LHP BPK, 2017)

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah belum maksimalnya pembuatan *database* pendapatan daerah, serta kemampuan daerah dalam memenuhi belanja yang diperlukan,



kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk mencapai target kinerja keuangan pemerintah daerah, serta masih kurangnya kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Berbagai permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja keuangan pada pemerintah kota Makassar dan pemerintah kabupaten Jeneponto yang disebutkan di atas mengindikasikan pentingnya langkah taktis dalam mengatasi permasalahan tersebut demi mencapai output yang ditargetkan oleh pemerintah daerah. Berbagai permasalahan yang disebutkan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah ditunjang oleh aspek keuangan dan non keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.

Pengukuran kinerja pada organisasi non profit seperti pemerintahan sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja tidak hanya dapat diukur dengan mempertimbangkan aspek finansial dalam suatu organisasi namun juga penting untuk mempertimbangkan aspek non-finansial seperti *intellectual capital* (IC), dimana *intellectual capital* ini merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat kinerja. Oliveira *et. al.* (2014) mengamati bahwa perusahaan dengan *intangibility* lebih besar menyajikan kinerja yang unggul kepada orang lain dan bahwa *intangible asset* (IA) sanggup menghasilkan keunggulan kompetitif. *Intangible asset* merupakan sumber daya yang berharga, langka, dan tidak mungkin disalin atau tergantikan yang akan menjadi sumber keunggulan kompetitif yang tahan lama (Kozak M., 2011). Baik dianalisis dari sudut pandang kualitatif dan kuantitatif, pandangan mengenai modal intelektual (IC) sangat menentukan

dan kontribusi secara ekonomi atau keuntungan (Suciu, *et. al.*, 2011). modal berbasis pengetahuan atau modal intelektual dianggap sebagai yang paling penting dan tentunya dapat menunjang kinerja dari organisasi.



Bentuk implikasi dari sebuah budaya organisasi yang kuat dapat dilihat dari penerapan *intellectual capital* dalam organisasinya. Sebuah budaya organisasi yang kuat yang diharapkan dapat selalu mempertahankan dan menciptakan nilai-nilai inti organisasi mereka baik pada aspek manusia, struktur, serta relasinya. Modal intelektual (IC) merupakan pengetahuan kolektif yang tertanam dalam personil, rutinitas organisasi dan hubungan jaringan organisasi (Stewart, 1997; Kong dan Prior, 2008). Dengan kata lain, merujuk karya sejumlah ilmuwan di lapangan, IC umumnya diambil untuk mencakup tiga komponen yang saling terkait utama: modal manusia (HC), modal relasional (RC), dan modal struktural (SC) (Bontis, 1998; Stewart, 1997).

Pengungkapan *intellectual capital* sering digunakan sebagai alat ukur organisasi. Salah satu alasannya adalah karena dalam menentukan kinerja organisasi, *intellectual capital* tidak hanya berfokus pada pengukuran finansial tetapi mempertimbangkan pengukuran non finansial, seperti *human capital*, *structural capital* dan *external capital*. *Human capital* dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, pengalaman, intuisi dan sikap dari karyawan. *Structural capital* terdiri dari berbagai komponen seperti hak paten, konsep, model, dan komputer atau sistem administrasi. Sedangkan *external capital* merupakan modal pelanggan yang berarti berkaitan dengan hubungan organisasi dengan pelanggan atau pihak-pihak eksternal.

IC dapat diukur dengan indikator yang mengarah ke efek terhadap IAS dan kinerja serta keberhasilan organisasi (Jordao dan Almeida, 2017). Grajkowska (2011) dan Maditinos *et. al.* (2011) melakukan penelitian model kuantitatif untuk mengukur IC, berdasarkan indikator kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa modal intelektual diakui sebagai penting bahwa organisasi perlu mengembangkan untuk mendapatkan kompetitif yang berkelanjutan (Kong dan Prior, 2008). Chen *et al.*



(2005) juga menemukan adanya hubungan yang signifikan antara *intellectual capital* dengan kinerja keuangan. Penelitian lain dilakukan oleh Gogan *et. al.* (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *intellectual capital* dengan kinerja keuangan.

Pentingnya penerapan modal intelektual di sektor publik adalah karena fakta bahwa *intangibile* bahkan lebih memiliki andil dalam entitas sektor publik daripada perusahaan swasta; pertama, karena administrasi publik cenderung memiliki beberapa tujuan yang bersifat non-keuangan; kedua, karena di antara sumber daya produktif seperti sumber daya manusia, modal intelektual, bahan baku dan mesin, badan administrasi publik secara intensif menggunakan SDM dan modal intelektual, yang tidak berwujud; dan akhirnya, karena produk akhir dari publik administrasi layanan, dan ini pada dasarnya tidak berwujud (Serrano *et al.*, 2003). Di samping itu, sektor publik menempatkan manusia (pegawai) sebagai modal utama dan terfokus pada hasil tidak berwujud (Wall, 2005).

Guthrie *et. al.* (2012) menemukan bahwa sektor publik merupakan salah satu wilayah tujuan penelitian IC. Literatur akuntansi menekankan pentingnya mengukur, visualisasi, dan pelaporan IC untuk meningkatkan kontrol manajemen dan proses pengendalian strategis yang berkaitan dengan kedua organisasi baik swasta maupun non profit (Mouritsen *et. al.*, 2001). Dari awal organisasi sektor publik telah menjadi bagian dari pengembangan IC, seperti berpartisipasi dalam mengembangkan pedoman pernyataan IC Denmark (Mouritsen *et. al.*, 2001). Manajemen modal intelektual telah diusulkan sebagai pendekatan manajerial baru dalam organisasi non-profit (Kong dan Prior, 2008). Manajemen dalam sektor publik yang modern menawarkan prioritas utama pada kebutuhan publik dan

pelayanan, yang memeberikan pembenaran mengenai membangun
memasukkan manajemen modal intelektual sebagai pendekatan baru
membantu efisiensi dan efektifitas dalam fungsi publik. Hanya beberapa



organisasi masyarakat telah mengambil tantangan mencoba untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan aset tidak berwujud (Ramirez, 2010). Konsep-konsep baru yang berasal dari *new public management* (NPM), terutama yang berhubungan dengan efisiensi, efektivitas dan penghematan, telah memberikan kontribusi positif dalam elaborasi dari pandangan yang lebih ke arah administrasi pemerintahan, konteks di mana konsep-konsep yang berkaitan dengan modal intelektual dapat dimasukkan (Bossi, 2003). Dragonetti dan Roos (1998) menunjukkan bahwa jawaban yang mungkin untuk mengukur utilitas publik berasal dari penerapan manajemen modal intelektual.

Pengaruh aspek non-finansial dalam hal ini modal intelektual terhadap kinerja keuangan tentu saja harus didukung pula oleh aspek keuangan. Terdapat banyak faktor keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan namun yang menarik adalah *intergovernmental revenue* dan *leverage*. Pada umumnya pemerintah daerah di Indonesia menempatkan *intergovernmental revenue* (dana perimbangan) sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah termasuk pada daerah-daerah di Sulawesi Selatan. Patrick (2007) menyebutkan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah daerah. Beberapa penelitian telah mengkaji pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Andirfa (2016) menyebutkan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander (2016) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan

kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara parsial maupun Hasil penelitian berbeda dilakukan Sesotyaningtyas (2012) yang



menyimpulkan bahwa *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Januari s.d. Desember 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	PAD	DANA PERIMBANGAN
1	Makassar	Rp 971.859.753.605	Rp 1.992.747.630.282
2	Gowa	Rp 187176.036.300	Rp 1.225.854.162.037
3	Takalar	Rp 95,625.946.515	Rp 936.066.026.537
4	Jeneponto	Rp 77.638.677.214	Rp 970.730.908.551
5	Bantaeng	Rp 61.099.310.250	Rp 808.530.364.485
6	Bulukumba	Rp 128.236.254.047	Rp 1.083.310.620.437
7	Selayar	Rp 48.167.309.586	Rp 751.553.019.395
8	Maros	Rp 165.487.675.628	Rp 1.067.130.874.537
9	Pangkajene Kepulauan	Rp 156.226.631.623	Rp 1.114.262.819.971
10	Barru	Rp 82.525.913.520	Rp 800.658.633.788
11	Pare-pare	Rp 136.313.232.054	Rp 730.121.077.911
12	Sidenreng Rappang	Rp 98.400.923.153	Rp 974.121.056.622
13	Pinrang	Rp 113.038.054.428	Rp 1.025.000.033.024
14	Enrekang	Rp 56.383.475.385	Rp 833.120.190.848
15	Tana Toraja	Rp 101.993.901.924	Rp 756.949.422.575
16	Toraja Utara	Rp 34.896.515.041	Rp 677.025.597.393
17	Bone	Rp 180.156.598.903	Rp 1.540.620.696.554
18	Soppeng	Rp 91.123.526.502	Rp 1.014.280.208.517
19	Wajo	Rp 117.782.098.209	Rp 1.031.286.570.788
20	Sinjai	Rp 79.491.453.854	Rp 942.186.494.783
21	Luwu	Rp 95.564.293.748	Rp 994.0067.307.808
22	Palopo	Rp 134.110.076.220	Rp 807.007.722.676
23	Luwu Utara	Rp 140.996.159.504	Rp 884.469.203.093
24	Luwu Timur	Rp 177.018.897.819	Rp 1.197.290.689.235

Sumber: Hasil olah data, 2018 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Dari tabel 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasionalnya masih

terbatas karena hanya bergantung pada PAD. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keseimbangan menjadi faktor penentu kinerja keuangan pemerintah daerah.



Daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terendah adalah pemerintah kota Makassar dan daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tertinggi adalah pemerintah kabupaten Jeneponto.

Faktor keuangan lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah *leverage*. *Leverage* berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah menutupi biaya atau bebannya dengan menggunakan ekuitas. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat *leverage* yang besar menunjukkan pemerintah daerah tidak mampu dalam membiayai operasionalnya sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) menunjukkan *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Minarsih (2015) menyimpulkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tabel 1.2 Tingkat Kewajiban Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode Januari s.d. Desember 2016

NO.	KABUPATEN/KOTA	KEWAJIBAN	EKUITAS
1	Makassar	Rp 141.411.479.163	Rp 27.851.922.569.650
2	Gowa	Rp 78.125.754.615	Rp 2.994.455.489.413
3	Takalar	Rp 27.331.091.617	Rp 1.456.672.431.695
4	Jeneponto	Rp 102.268.667.318	Rp 1.745.454.197.563
5	Bantaeng	Rp 26.420.848.491	Rp 1.840.548.397.719
6	Bulukumba	Rp 99.194.698.320	Rp 2.178.095.760.274
7	Selayar	Rp 14.532.926.621	Rp 2.157.926.545.196
8	Maros	Rp 29.648.419.509	Rp 2.149.629.959.705
9	Pangkajene Kepulauan	Rp 86.535.680.158	Rp 1.947.040.596.967
10	Barru	Rp 56.266.925.362	Rp 1.924.597.338.528
11	Pare-pare	Rp 113.984.173.289	Rp 1.928.570.136.952
	Enreng Rappang	Rp 353.509.047.580	Rp 2.152.957.280.438
	ang	Rp 48.763.819.511	Rp 2.491.215.195.072
	ekang	Rp 32.110.903.376	Rp 1.674.196.712.675
	a Toraja	Rp 71.997.595.239	Rp 1.725.195.106.315



Lanjutan...

NO.	KABUPATEN/KOTA	KEWAJIBAN	EKUITAS
16	Toraja Utara	Rp 47.593.224.998	Rp 1.087.728.349.875
17	Bone	Rp 51.748.659.320	Rp 2.275.507.472.140
18	Soppeng	Rp 42.935.387.162	Rp 1.889.239.917.271
19	Wajo	Rp 40.806.662.080	Rp 2.749.099.142.433
20	Sinjai	Rp 25.276.815.454	Rp 1.563.700.306.532
21	Luwu	Rp 37.829.323.141	Rp 2.011.909.116.365
22	Palopo	Rp 111.030.874.314	Rp 1.611.135.230.940
23	Luwu Utara	Rp 45.769.470.591	Rp 981.552.542.223
24	Luwu Timur	Rp 94.969.362.828	Rp 2.574.537.542.509

Sumber: Hasil olah data, 2018 (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga bergantung pada tingkat kewajiban untuk membiayai operasionalnya. Dapat dilihat pemerintah daerah yang memiliki tingkat kewajiban tertinggi adalah pemerintah kota Makassar dan yang daerah yang memiliki tingkat kewajiban terendah adalah pemerintah kabupaten Toraja Utara. Meskipun banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kewajiban setiap daerah tetapi hal tersebut sudah mengindikasikan bahwa pemerintah daerah juga masih membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya penelitian *intellectual capital* pada sektor publik masih dirasakan kurang dan terdapat inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan *intellectual capital* secara teoritis dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah apalagi bila ditunjang oleh aspek keuangan seperti *leverage* dan *intergovernmental revenue* memberikan motivasi untuk

penelitian selanjutnya demi memperoleh hasil pengujian terbaru. Dasar ini adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Farah dan



Abouzeid (2017), Jordao dan Almeida (2017), serta Sesotyaningtyas (2012) berdasarkan dukungan *Stakeholder Theory* dan *Resource Based View Theory*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan?
2. Apakah *intergovernmental revenue* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan?
3. Apakah *leverage* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut.

1. Pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
2. *Intergovernmental revenue* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
3. *Leverage* dapat memoderasi pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan. Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoretis, praktis, dan kebijakan.



1.4.1 Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *intellectual capital*, *intergovernmental revenue*, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini menyediakan ruang ilmiah untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai *intellectual capital* dan kinerja keuangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengembangan sistem pemerintahan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian *intellectual capital* dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pada pedoman penulisan tesis dan disertasi yang ditulis oleh Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Sistematika penulisan disajikan ke dalam tujuh bab.

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini diuraikan latar belakang peneliti mengangkat topik penelitian ini, selain itu dalam bab ini dijelaskan mengenai *intellectual capital* pada sektor publik.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini memuat uraian sistematik tentang teori, konsep, pemikiran, dan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian teoritis dan empiris dalam suatu kerangka pemikiran.

BAB IV KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian teoritis dan empiris dalam suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dibangun kerangka



konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep yang diteliti. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pengembangan hipotesis yang diteliti.

BAB IV METODE PENELITIAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, bagaimana penentuan sampel, penentuan jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai deskripsi data dan hasil penelitian.

BAB VI PEMBAHASAN. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengaruh variabel independen yaitu *intellectual capital* dan variabel moderasi yaitu *intergovernmental revenue* dan *leverage* terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya akan dijelaskan juga pengaruh variabel moderasi yaitu *intergovernmental revenue* dan *leverage* dalam memoderasi hubungan antara variabel independen yaitu *intellectual capital* dengan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB VII PENUTUP. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Dalam menilai kinerja keuangan pada intitusi publik khususnya pemerintah daerah, tidak menutup kemungkinan adanya faktor-faktor penentu yang dapat memengaruhinya baik faktor keuangan maupun faktor non-keuangan. Dalam melihat pengaruh faktor-faktor tersebut, peneliti menggunakan pendekatan melalui teori yang ada.

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Stakeholder theory atau lebih dikenal sebagai teori *stakeholder* adalah sebuah teori yang memberikan gambaran kepada pihak-pihak mana saja perusahaan harus bertanggung jawab. Manajemen sebuah organisasi diharapkan melakukan aktivitas berdasarkan tujuan organisasi sesuai dengan keinginan *stakeholder* dan melaporkan aktivitas-aktivitas tersebut kepada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi mereka, bahkan ketika mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan ketika mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004).

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana.

Freeman (2001) dalam mengembangkan teori *stakeholder* memperkenalkan konsep *stakeholder* dalam dua model, yaitu (a) model kebijakan dan perencanaan

model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen *stakeholder*.

Model pertama konsep *stakeholder*, fokusnya adalah mengembangkan dan



mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, teori *stakeholder* berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan *stakeholder*-nya. Sementara dalam model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator (*government*) dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial.

Jika teori ini dikaitkan dengan jenis pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan pengungkapan yang dilakukannya sesuai dengan kepentingan *stakeholder* yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan perusahaan. Salah satu jenis pengungkapan yang semakin banyak dilakukan oleh organisasi saat ini adalah pengungkapan mengenai *intellectual capital* yang dimiliki oleh organisasi. Saat ini pengungkapan *intellectual capital* ini tidak hanya dilakukan oleh organisasi-organisasi sektor privat saja, tetapi juga telah banyak dilakukan dalam sektor publik. Belakangan ini instansi-instansi pemerintah telah melakukan pengungkapan berupa *intellectual capital* dalam laporan keuangan mereka untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan semakin transparannya informasi keuangan instansi pemerintah diharapkan nantinya masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kinerja instansi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kinerja keuangan.

2.1.2 Resources Based View Theory

Teori *resources based view* adalah teori yang mengemuka menjelang tahun 1980-an dalam bidang manajemen strategis. *Resources based view theory* (RBV) adalah salah satu pendekatan kontemporer yang dominan digunakan untuk



melakukan analisis mengenai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari sebuah organisasi. Mulyono (2013) menyatakan bahwa *resource based theory* ini mencoba untuk menjelaskan mengapa dalam industri yang sama ada perusahaan yang sukses sementara banyak yang tidak sukses. Premis utama yang digunakan dalam *resource based theory* adalah bahwa perusahaan bersaing berdasarkan basis sumber daya dan kemampuan mereka (Peteraf dan Bergen, 2003).

Peteraf dan Bergen (2003) menyatakan dalam tulisannya bahwa pandangan berbasis sumber daya (*resource based view*) menekankan bahwa sumber daya perusahaan sebagai faktor fundamental penentu keunggulan dan kinerja kompetitif organisasi. Pandangan ini mengadopsi dua asumsi untuk menganalisis sumber keunggulan kompetitif. Pertama, model ini mengasumsikan bahwa perusahaan dalam suatu industri (atau strategis) mungkin heterogen sehubungan dengan kumpulan sumber daya yang mereka kontrol. Kedua, diasumsikan bahwa heterogenitas sumber daya dapat bertahan seiring waktu karena sumber daya yang digunakan untuk menerapkan strategi perusahaan tidak sempurna di seluruh perusahaan (beberapa sumber daya tidak bisa diperdagangkan di pasar dan sulit untuk menumpuk dan meniru).

Chun (2016) mengatakan bahwa dorongan utama *resource based view* adalah perusahaan bersifat heterogen, dan heterogenitas ini mencakup pengembangan keterampilan dan kemampuan untuk mengakses dan mengendalikan sumber daya. Dalam tulisannya tersebut *Resource based view* memiliki implikasi langsung pada tingkat aspirasi perusahaan, seperti perusahaan harus membuat keputusan tentang sumber daya apa yang harus dikeluarkan dan dengan cara apa tergantung atas apa tujuan perusahaan dianggap paling penting.

Resource based view dapat membantu menjelaskan dimana dan kapan sebuah perusahaan dapat memutuskan sumber daya yang lebih sedikit akan cukup, dan kapan lebih banyak sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan



keunggulan kompetitif yang berkesinambungan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Oleh sebab itu, secara garis besar *resource based view theory* ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan atau organisasi tidak dapat berharap untuk membeli atau mengambil keunggulan bersaing berkelanjutan yang dimiliki suatu organisasi lain, karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak tergantikan. Dalam *resource based view*, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh organisasi yang berkaitan dengan keunggulan bersaing yang berkelanjutan, salah satu faktor penentunya berasal dari sumber daya internal perusahaan yang salah satu komponen dari sumber daya internal ini adalah *human capital*.

RBT dapat menjelaskan bahwa perusahaan dengan kemampuan mengelola *intellectual capital* dengan maksimal dalam hal ini seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (*human capital*), aset fisik (*physical capital*) maupun *structural capital* dapat menciptakan nilai bagi perusahaan tersebut. Asumsi dari teori ini adalah bagaimana perusahaan mendapatkan nilai tambah (*value added*) dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Penciptaan nilai tambah bagi perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2.1.3 *Intellectual Capital Disclosure*

Istilah *intellectual capital* dikemukakan pertama kali oleh Galbraith pada tahun 1969. Ia menuliskan sebuah surat kepada temannya yang bernama Michael Kalecki, isi surat tersebut adalah:” *I wonder if you realize how much those of us the world around have owed to the intellectual capital you have provided over the* des” (Bontis, 2001).

bagai sebuah konsep, *intellectual capital* merujuk pada aset tidak (*intangible assets*) atau tidak kasat mata (*invisible*), yang berhubungan



dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta teknologi yang digunakan (Rupidara, 2008). Jadi di dalam *intellectual capital* terkandung beberapa aspek non-keuangan yang tidak memiliki nilai materil.

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ahli mengenai *intellectual capital*. Stewart (1997) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai “*The sum of everything everybody in your company knows that gives you a competitive edge in the market place. It is intellectual capital material-knowledge, information, intellectual property, experience-that can be put to use to create wealth*”. Guthrie dan Petty (2000) memberikan definisi *intellectual capital* sebagai “*...instrumental in the determination of enterprise value and national economic performance*”. Li et al. (2008) juga memberikan pendapat mengenai definisi *intellectual capital* sebagai “*...the possession of knowledge and experience, professional knowledge and skill, good relationship, and technological capacities, which when applied will give organizations competitive advantages*”.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *intellectual capital* merupakan aset tidak berwujud berupa pengetahuan, teknologi, inovasi, sistem operasional, serta hubungan yang baik dengan pelanggan yang dapat menimbulkan nilai lebih bagi organisasi. Sampai saat ini belum terdapat teori tunggal yang dapat dijadikan landasan utama dalam menggambarkan secara utuh mengenai *intellectual capital* disebabkan sulitnya mengukur *intangible asset* secara kuantitatif.

Suwardjono (2005) mendefinisikan pengungkapan merupakan sebuah konsep, metode dan media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Pengungkapan (*disclosure*) berhubungan

penjelasan mengenai hal-hal bersifat informatif yang dianggap penting dan
 at bagi pemakai selain apa yang dapat digambarkan melalui nilai-nilai
 i keuangan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah untuk



menyajikan informasi yang dirasa perlu dalam mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak dimana mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda (Suwardjono, 2005).

Pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan *intellectual capital* merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela. Sifat pengungkapan *intellectual capital* yang sukarela membuat organisasi memiliki kebebasan dalam mengungkapkan karena tidak diharuskan oleh regulasi. Keleluasaan tersebut menyebabkan terjadinya keragaman dalam kualitas pengungkapan sukarela diantara perusahaan publik (Marwata, 2001).

Beberapa penelitian mengembangkan model pengukuran dan pengungkapan *intellectual capital*. Hal tersebut diungkapkan Schneider dan Samkin (2008) yang menyebutkan penelitian *intellectual capital* dilakukan di Australia (Ghutri *et al.* 1999; Ghutrie dan Petty 2000), Kanada (Bontis 2001), Irlandia (Brennan 2001), Italia (Bozzolan *et al.* 2003), New Zealand (Wong dan Gardner 2005), Singapura (Firer dan Williams 2005), Sri Lanka (Abeysekera dan Guthrie 2001, 2005), Swedia (Olsson 2001) dan Inggris (Williams 2001).

Awal mulai *intellectual capital* berkembang di Indonesia sejak munculnya PSAK No.19 (revisi 2000) mengenai aset tidak berwujud. Menurut PSAK No. 19, sesuatu hal dapat digolongkan sebagai aset tidak berwujud jika memenuhi kriteria di bawah ini: (a) aset tersebut dapat diidentifikasi, (b) aset tersebut tidak mempunyai wujud fisik, (c) aset tersebut dimiliki dan di bawah kontrol perusahaan, (d) aset tersebut dapat dijual, disewakan, dan dipertukarkan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif, dan (d) harga perolehan aset tersebut dapat diukur

ndal.

berapa peneliti telah menawarkan model untuk mengukur seberapa jauh dari *intellectual capital disclosure* dalam *annual report*. Secara garis besar,



dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, *intellectual capital* terbagi menjadi tiga aspek pokok yang telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Ketiga aspek tersebut adalah:

1. *Human Capital (Employee Competence)*

Human capital merupakan *lifeblood* dalam *intellectual capital* (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Komponen ini mencakup kompetensi dan pengetahuan individu yang ditunjukkan oleh karyawan perusahaan. Beberapa karakteristik yang dimasukkan dalam *human capital/employee competence* antara lain: *know-how, employee education programs, vocational qualification, work-related knowledge, cultur diversity, entrepreneurial innovativeness, equal employment opportunities, executive compenzation plan, training programs, dan union activity* (Schneider *et.al.*, 2008).

2. *Structural Capital/Internal Capital*

Structural capital merupakan kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). *Internal capital* mencakup: *intellectual property, management philosophy, management processes, corporate culture/value, information/networking system, financial relation, dan promotional tools* (Schneider *et al.*, 2008).

3. *Relational Capital/External Capital*

Elemen ini merupakan komponen modal intelektual yang memberikan nilai secara nyata. *Relational capital* merupakan hubungan yang harmonis yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Menurut

et al. (2008) pengukuran *external capital* pada pemerintah daerah *brand, ratepayer database, ratepayer demographics, ratepayer*



satisfaction, backlog work, distribution channel, business collaboration, licensing agreement, dan quality standard.

Konsep *intellectual capital* diyakini mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan *value of firm* dan kinerja perusahaan baik sekarang maupun masa depan (Ulum dan Ghozali 2006). Unsur-unsur dalam *intellectual capital* seperti *structural capital, costumer capital, dan human capital* belum banyak diperhatikan oleh perusahaan, padahal unsur-unsur tersebut merupakan elemen pembangun *intellectual capital* yang sangat penting bagi perusahaan (Suarjuwono dan Kadir 2003).

Manfaat pengungkapan *intellectual capital* adalah dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi maka akan dapat diperoleh bagaimana cara menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing (Rupert, 1998). Manfaat lainnya disampaikan oleh Suwarjuwono dan Kadir (2003) bahwa *intellectual capital* dianggap sebagai aset utama perusahaan karena dapat memberikan *value added* bagi perusahaan tersebut sehingga perlu untuk diungkapkan. Manfaat *intellectual capital* membuat manajer/pimpinan lebih mampu untuk mengelola modal intelektual, karena apabila tidak diungkapkan maka ada risiko bahwa hal itu tidak akan mendapatkan perhatian yang cukup (Guthrie dan Petty, 2000).

Pengungkapan *intellectual capital* telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Suhardjanto dan Wardhani (2010) yang menemukan bahwa pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sebesar 35%. Yunanto (2010) meneliti tentang pengungkapan *intellectual capital* di sektor publik di Indonesia dengan hasil 17,9 %.



ergovernmental Revenue

ergovernmental revenue adalah pendapatan yang diterima pemerintah yang berasal dari sumber eksternal dan tidak memerlukan adanya

pembayaran kembali (Patrick, 2007). *Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Suhardjanto et al., 2010). Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, dana perimbangan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi. Dana perimbangan meliputi dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut

kan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

na Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk



mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawabnya;
 2. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
 3. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
 4. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya
- n, khususnya sumber daya keuangan.

da aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah ini Elmi (2002) kapkan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan



terjadi pembagian keuangan yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari DAU dan DAK (Julitawati, 2012).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan adanya era desentralisasi, pengawasan keuangan terhadap pemerintah daerah harus lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat agar tercipta suasana pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membentuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melaksanakan fungsi pengawasan keuangan internal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan fungsi pengawasan eksternal (Cahyat, 2004).

Dengan adanya dana suntikan dari pemerintah pusat, diharapkan dapat memperlancar jalannya pemerintahan di tingkat daerah. Dana ini dipergunakan untuk pendanaan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pelayanan publik. Dengan adanya pelayanan publik yang memadai dan tepat sasaran membuktikan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki kinerja keuangan yang baik (Sesotyangingtyas, 2012).

2.1.5 Leverage

Leverage berhubungan dengan penggunaan aset atau dana dimana penggunaan aset tersebut digunakan untuk menutupi segala kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang

dari pihak eksternal dibandingkan dengan ekuitas sendiri. Hal ini kasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar daripada ekuitas maka hal



tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2010).

Di dalam sektor publik, rasio utang atau *leverage* sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio ini akan digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya. Rasio ini digunakan untuk bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban. Rasio ini juga mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah terbebani oleh kewajibannya. Jika rasio ini tinggi, maka pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang dan harus dicari jalan untuk mengurangi utang (Sesotyaningtyas, 2012).

Utang daerah atau pinjaman daerah dapat bersumber dari:

1. Pemerintah pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri dan/atau penerusan pinjaman luar negeri.
2. Pemerintah daerah lain.
3. Lembaga keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Lembaga keuangan bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah daerah yang memiliki *leverage* yang besar maka diprediksi memiliki tingkat resiko yang besar. *Leverage* menggambarkan struktur modal yang

perusahaan sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang (Perwitasari, 2010).



2.1.6 Laporan Keuangan Sektor Publik

Bastian (2010) mendefinisikan laporan keuangan sektor publik sebagai representasi posisi keuangan dari sejumlah transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Menurut Bastian (2010), bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran setidaknya harus memuat unsur pendapatan, LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a



Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.



7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan, penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

2.1.7 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan (Azhar, 2008). Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Menurut Halim (2007), “kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”.

Harman (1997) dalam *Government Performance and Result Act, A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement* menyatakan bahwa pengukuran/penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang (Bastian, 2006).

Penilaian/pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya

pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah



menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan (Sesotyaningtyas, 2012). Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktivitas pada organisasi sektor publik (Halachmi, 2005).

Menurut Mardiasmo (2004) pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, dimaksudkan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya (Mardiasmo, 2004). Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sesuatu yang memang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja juga merupakan salah satu kunci sukses dari pembaruan dalam sektor publik (Greiling,



Untuk mengetahui prestasi sebuah organisasi tertentu memerlukan ukuran kriteria sebagai indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Menurut Halim

(2007), didalam penilaian indikator kinerja sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu, (1) Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam APBD, (2) Efisiensi biaya, (3) Efektivitas program, (4) Pemerataan dan keadilan. Menurut Mahsun (2006) dalam konteks pemerintahan sebagai sektor publik, ada beberapa aspek yang dapat dinilai kinerjanya, yaitu:

1. Kelompok Masukan (*Input*)
2. Kelompok Proses (*Proccess*)
3. Kelompok Keluaran (*Output*)
4. Kelompok Hasil (*Outcome*)
5. Kelompok Manfaat (*Benefit*)
6. Kelompok Dampak (*Impact*).

Fokus pengukuran kinerja sektor publik justru terletak pada *outcome* dan bukan *input* dan proses, *outcome* yang dimaksudkan adalah *outcome* yang dihasilkan oleh individu ataupun organisasi secara keseluruhan, *outcome* harus mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi sektor publik. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi (Halim, 2007).

2.2 Tinjauan Empiris



penelitian terkait *Intellectual Capital* dan kinerja keuangan saat ini semakin banyak, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya penelitian yang dilakukan berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Salah satu penelitian yang

membahas mengenai dampak *Intellectual Capital* terhadap kinerja dipublikasikan oleh Ming-Chin Chen, *et. al.* (2005), yang meneliti mengenai hubungan antara *intellectual capital*, Nilai Pasar Perusahaan, dan Kinerja Keuangan. Penelitiannya tersebut menunjukkan hasil bahwa modal intelektual perusahaan memiliki dampak positif pada nilai pasar dan kinerja keuangan, dan dapat menjadi indikator kinerja keuangan di masa depan. Beberapa publikasi lainnya juga menemukan hasil yang serupa dengan penelitian Ming-Chin Chen, *et. al.* (2005), yakni terdapat hubungan positif antara *Intellectual Capital* dan kinerja keuangan (Gogan, *et. al.*, 2016; Jordão dan Almeida, 2017; Fathi *et. al.*, 2013; dan Shahzad *et. al.*, 2014).

Penelitian mengenai *Intellectual Capital* yang ada saat ini juga semakin berkembang, dimana penelitian yang ada tidak lagi hanya sebatas pada hubungan langsung antara *Intellectual Capital* dan kinerja organisasi, tetapi juga telah menambahkan variabel moderasi didalamnya. Kamukama *et. al.* (2011) dengan penelitian berjudul *Competitive Advantage: Mediator of Intellectual Capital and Performance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mediasi keunggulan kompetitif dalam hubungan antara modal intelektual dan kinerja keuangan di lembaga-lembaga keuangan mikro Uganda. Hasil penelitian ini menunjukkan keunggulan kompetitif secara signifikan signifikan memediasi hubungan antara modal intelektual dan kinerja keuangan dan meningkatkan hubungan antara kedua variabel tersebut sebesar 22,4 persen di lembaga-lembaga keuangan mikro Uganda. Selanjutnya temuan menerima hubungan secara parsial mediasi antara modal intelektual, keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan. Selain itu, Soewarno (2011) juga mencoba menguji hubungan antara *Intellectual Capital* dan kinerja keuangan dengan menempatkan ukuran, jenis industri, dan

sebagai variabel *moderating*. Hasil penelitiannya tersebut menunjukkan *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi (*Return On* atau ROA maupun *Market to Book Value* atau MB), namun tidak



berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Organisasi (*Assets Turn Over* atau ATO). Kemudian, *Leverage* dapat memoderasi hubungan antara *Intellectual Capital* dan Kinerja Keuangan Organisasi (ROA dan MB).

Patrick (2007) dengan judul penelitian *The Determinants of Organizational Innovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Penelitian ini menggunakan model inovasi organisasi Everett Rogers' (2003) yang disesuaikan untuk mengidentifikasi karakteristik organisasi pemerintah daerah Pennsylvania yang telah mengadopsi GASB 34. Model ini menggunakan tiga komponen organisasi (budaya organisasi, struktur organisasi, dan lingkungan eksternal) yang sering dikaitkan dengan adopsi inovasi. Hasil penelitian ini menunjukkan enam variabel yang kurang kuat terkait dengan adopsi seperti spesialisasi pekerjaan, diferensiasi fungsional, intensitas administrasi, ketersediaan sumber daya, transfer dana, dan pembiayaan utang yang terkait dengan adopsi, tetapi kekuatan dari asosiasi adalah ringan sampai sedang.

Di sektor publik sendiri, penelitian terkait *Intellectual Capital* pada awalnya dimulai dari penelitian yang dilakukan oleh Ramírez (2010) mempublikasikan penelitiannya yang bertopik *Intellectual Capital* di sektor publik, dalam penelitiannya tersebut menawarkan pandangan praktis tentang bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola modal intelektual dari entitas publik. Temuan penelitiannya tersebut menyebutkan dalam paradigma institusional baru, pengetahuan dan nilai-nilai tak berwujud menjadi sumber utama keunggulan kompetitif bagi entitas publik. Unsur-unsur ini, ketika dikelola dengan baik, adalah faktor-faktor untuk sukses dalam entitas publik. Itulah sebabnya mengapa manajer publik terus mencari alat-alat baru untuk peningkatan yang efektif dalam kinerja

lembaga publik, dan salah satu alat ini adalah model manajemen modal intelektual. Farah dan Abouzeid (2017) juga telah melakukan penelitian terkait topik *Intellectual Capital*, namun berbeda dengan penelitian yang telah



dilakukan oleh Ramírez (2010), mereka mencoba untuk melihat pengaruh modal intelektual pada kinerja organisasi di sektor publik dan mempelajari keterkaitan antara variabel modal intelektual. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya manusia, modal sosial dan organisasi dalam meningkatkan kinerja dalam organisasi diteliti. Hasil menunjukkan bentuk-bentuk modal diteliti dapat saling berhubungan dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja organisasi.

Di sektor publik penelitian terkait topik *Intellectual Capital* tidak hanya terbatas pada keterkaitan *Intellectual Capital* dengan kinerja keuangan saja, tetapi juga telah meluas pada pengungkapan *Intellectual Capital* itu sendiri. Penelitian yang telah dipublikasikan terkait topik tersebut adalah penelitian Schneider dan Samkin (2008) dengan judul penelitian *Intellectual Capital Reporting by the New Zealand Local Government Sector*. Penelitian ini membangun indeks ICD melalui proses konsultasi pemangku kepentingan partisipatif untuk mengembangkan sejauh mana indeks pengungkapan dan kualitas pelaporan modal intelektual di laporan tahunan 2004/2005 dari 82 pemerintah daerah di Selandia Baru. Indeks tersebut terdiri 26 item dibagi menjadi tiga kategori: modal internal, modal eksternal, dan *human capital*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan modal intelektual oleh pemerintah daerah bervariasi, item yang paling dilaporkan adalah gabungan usaha/kolaborasi bisnis dan proses manajemen, sedangkan item yang paling sedikit dilaporkan adalah intelektual properti dan perizinan perjanjian. Kategori yang paling dilaporkan modal intelektual adalah kas internal, diikuti oleh modal eksternal, modal manusia adalah kategori paling sering dilaporkan.



Penelitian yang sedang berkembang di sektor publik saat ini, tidak hanya pada pengaruh *intellectual capital* dan kinerja keuangan saja, tetapi juga ditambah pada pembahasan mengenai *intergovernmental revenue* atau

lebih dikenal di Indonesia sebagai dana perimbangan. Andirfa, dkk. (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan, yang mana dalam penelitiannya tersebut, ia memperoleh hasil bahwa belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun hasil pengujian secara parsial, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Hasil serupa juga ditemukan oleh Budianto dan Alexander (2016) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Kedua penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Renas (2014), Sesotyaningtyas (2012) dan Kusumawardani (2012).

Sumarjo (2010), mempublikasikan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 125 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2008 dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil yang ditunjukkan penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kusumawardani (2012), melakukan penelitian mengenai pengaruh *size*,

ukuran, ukuran legislatif, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif, *leverage* mempengaruhi



kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 31,5%. Hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Minarsih (2015) juga melakukan penelitian terkait Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage*, dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable *size*, *wealth*, *leverage* dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah secara parsial untuk rasio efisiensi. Sedangkan untuk model kedua, hanya variabel *leverage* dan *intergovernmental revenue* yang berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah untuk rasio efektivitas.

Setyaningrum dan Syafitri (2012) dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009. Hasil penelitian ini menunjukkan umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh negatif yang signifikan.

Weill (2003), melakukan penelitian terkait *Leverage* dan kinerja organisasi. Penelitian ini berusaha memberikan bukti empiris baru pada isu tata kelola perusahaan utama: hubungan antara leverage dan kinerja perusahaan. Peneliti membawa dua perbaikan besar untuk literatur ini dengan menerapkan teknik-teknik efisiensi untuk mendapatkan ukuran kinerja bagi perusahaan dari beberapa negara (Perancis, Jerman dan Italia). Kemudian penelitian dilanjutkan ke regresi kinerja perusahaan pada berbagai set variabel termasuk *leverage*. Hasil penelitian

menemukan bukti campuran tergantung pada negara: hubungan antara leverage dan kinerja perusahaan negatif signifikan di Italia, hubungan antara leverage dan kinerja perusahaan adalah positif signifikan di Perancis dan Jerman.



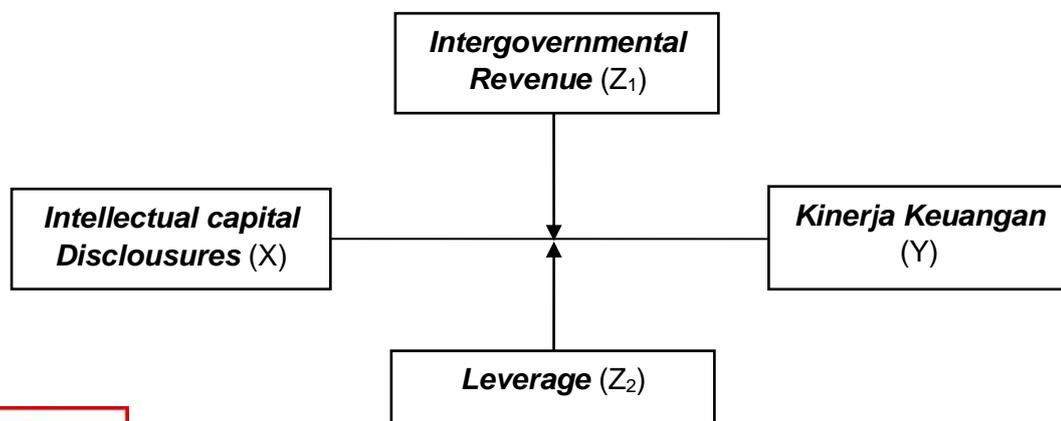
BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian terdahulu disusunlah kerangka konseptual. Kerangka pemikiran penelitian ini pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini adalah keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini akan dilakukan pengujian mengenai pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dimoderasi oleh *intergovernmental revenue* dan *leverage*. Penelitian ini akan menguji *intergovernmental revenue* dan *leverage* yang memoderasi hubungan antara *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara ringkas pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pemoderasi *intergovernmental revenue* dan *leverage* dapat dijelaskan oleh kerangka pemikiran sebagai berikut.



Replikasi atas beberapa penelitian terdahulu (Soewarno, 2011; Ingtyas, 2012; Farah dan Abouzeid, 2017)

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

